

ABSTRAK

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi wisata dengan lokasi strategis untuk meningkatkan citra daerah, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum yang tepat agar pengembangan pariwisata berlangsung secara berkelanjutan. Hadirnya program SDGs menjadi solusi dalam penyeimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga, SDGs dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kebijakan daerah di bidang pariwisata guna memastikan kesesuaian regulasi dengan prinsip SDGs untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan berdasarkan perspektif SDGs di Kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis serta menyelaraskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kesesuaian antara Perda No. 7 Tahun 2017 dan Perda No.1 Tahun 2020 dengan SDGs (tujuan ke-8, ke-11, ke-12, ke-14, dan ke-15 sebagai dasar analisis), pada beberapa pasalnya telah selaras dengan tujuan ke-8, ke-12, dan ke-15. Namun, terdapat kekaburan norma pada beberapa ketentuan terkait tujuan ke-15 tentang ekosistem daratan, serta belum terintegrasinya tujuan ke-11 dan ke-14. Untuk mengatasinya, penelitian ini merekomendasikan untuk memperjelas ketentuan selanjutnya melalui Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi norma yang telah diselaraskan dengan tujuan SDGs dan disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan pariwisata di Kabupaten Bangkalan, yang dapat diintegrasikan sebagai dasar dalam ketentuan lanjutan dalam Peraturan Bupati tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah - Tujuan SDGs - Kesesuaian

ABSTRACT

Bangkalan Regency has tourism potential with a strategic location to improve the image of the region, economy, and community welfare. Therefore, appropriate legal policies are needed so that tourism development takes place sustainably. The presence of the SDGs program is a solution in balancing social, economic, and environmental aspects. Thus, SDGs can be integrated into legal policies in the tourism sector. Therefore, an analysis of regional policies in the tourism sector is needed to ensure the suitability of regulations with the principles of SDGs to realize sustainable tourism based on the SDGs perspective in Bangkalan Regency.

The research method used in compiling this research is normative juridical. This method is carried out by examining laws and regulations that aim to answer the legal issues being studied. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. This approach is used to analyze and align legal policies related to the problems in this research.

The results of this study indicate that the suitability between Regional Regulation No. 7 of 2017 and Regional Regulation No. 1 of 2020 with the SDGs (goals 8, 11, 12, 14, and 15 as the basis for analysis), in several articles have been aligned with goals 8, 12, and 15. However, there is a lack of norms in several provisions related to goal 15 concerning terrestrial ecosystems, and goals 11 and 14 have not been integrated. To overcome this, this study recommends clarifying further provisions through the Regent's Regulation as implementing regulations mandated in the Regional Regulation. This study also provides recommendations for norms that have been aligned with the SDGs goals and adjusted to the needs or conditions of tourism in Bangkalan Regency, which can be integrated as a basis for further provisions in the Regent's Regulation.

Keywords: Regional Policy - SDGs Goals - Compliance